



**RABU, 24 OKTOBER 2018**

**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

## Inventaris Aset Daerah

**KEPAHIANG** - Masih banyaknya aset milik Pemkab Kepahiang yang belum terdata, membuat Pemkab merasa perlu segera melakukan inventarisasi aset untuk kemudian dilakukan pengukuran dan penerbitan sertifikatnya. Diungkapkan Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setdakab Kepahiang, Iwan Zamzam Kurniawan, SH, pihaknya sudah mulai melakukan pendataan aset sejak beberapa pekan lalu, dan langsung melakukan pengukuran bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepahiang.

"Beberapa aset yang kita lakukan pendataan dan pengukuran diantaranya Kantor Camat Muara Kemumu yang sebelumnya sempat menjadi sengketa. Juga lahan TK Pembina Kembang Seri dan lahan SD Sukamerindu," jelas Iwan.

Dari hasil pendataan dan pengukuran yang telah dilakukan, sambung Iwan, Pemkab Kepahiang juga sudah menerima sertifikat lahan yang telah selesai diproses oleh BPN dan diterbitkan sertifikatnya, seperti Taman Makam Pahlawan di Desa Pagar Gunung, dan lahan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Desa Temedak.

"Kendati sudah ada yang diterbitkan sertifikatnya, namun kita masih terus melakukan inventarisasi aset berdasarkan usulan OPD terkait. Karena ada beberapa OPD yang juga minta dilakukan inventarisasi lahannya agar bisa segera diterbitkan sertifikat lahan, seperti lahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud)," terang Iwan.

Selain itu masih ada beberapa OPD dan instansi vertikal lainnya yang lahannya belum memiliki sertifikat. Diantaranya Kejari Kepahiang, Polres Kepahiang, KPU Kepahiang, Bappeda Kepahiang, Inspektorat Daerah Kepahiang, Diskominfo Persandian dan Statistik, Kemenag Kepahiang, Dinas Perdagangan Koperasi UKM, Diparpora Kepahiang, Kantor Bupati Kepahiang serta Kantor DPRD Kepahiang.

Jika diakumulasikan, luas lahan yang dimiliki 11 bangunan tersebut mencapai 109,003 m<sup>2</sup>, dan diharapkan dalam waktu dekat ini Pemprov Bengkulu bisa mengeluarkan sertifikat hak pakai atas lahan tersebut, sehingga bisa masuk menjadi aset Pemkab Kepahiang.(sly)